



JURNAL ILMIAH
Pengayaan Pembelajaran dan Pendidikan Islam

Journal website: <https://jipp.hellowpustaka.id/index.php/i/index>

ISSN: 3064-6391 (Online)
<https://doi.org/10.61166/jipp.v2i1.8>

Vol. 2 No. 1 (2025)
pp. 61-71

Research Article

Analisis Manajemen Keuangan Pada Lembaga Bimbingan Belajar “Ahe Raja Edukasi”

Fatya Nur Aini Aulya Mutmainnah¹, Khurnia Setya Rahmawati², Chamdan Purnama³

^{1,2} Program Studi S1 Akuntansi, STIE Al-Anwar Mojokerto, Indonesia

³ STIE Al-Anwar Mojokerto, Indonesia

Correspondent: fatyaaini28@gmail.com 



Copyright © 2024 by Authors, Published by Jurnal Ilmiah Pengayaan dan Pembelajaran.
This is an open access article under the CC BY License
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : Des 01, 2024
Accepted : Mar 28, 2025

Revised : Des 11, 2025
Available online : May 01, 2025

How to Cite: Mutmainnah, F. N. A. A., rahmawati, khurnia setya, & Purnama, C. (2025). Analisis Manajemen Keuangan Pada Lembaga Bimbingan Belajar “Ahe Raja Edukasi”. *Jurnal Ilmiah Pengayaan Pembelajaran Dan Pendidikan Islam*, 2(1), 61–72. <https://doi.org/10.61166/jipp.v2i1.8>

Abstrak. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memberikan suatu analisis deskriptif mengenai pengelolaan manajemen keuangan di instansi pendidikan. Institusi pendidikan yang mana bergerak dalam kegiatan nirlaba juga melakukan proses manajemen. Institusi pendidikan dituntut untuk melaksanakan proses manajemen yang optimal berdasarkan konsepsi manajemen berbasis sekolah (MBS). Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan pengambilan data dilakukan di Bimbingan Belajar AHE RAJA EDUKASI, sekolah tersebut berbasis yayasan yang mana sebagian besar sumber pendapatan berasal dari Yayasan dan SPP para siswa setiap bulannya. Secara praktis hasil penulisan dari artikel ini diharapkan mampu memberikan wawasan mengenai pengelolaan keuangan pada lembaga Bimbingan Belajar dimulai dari perencanaan (planning), pelaksanaan (actuating), pencatatan, pertanggungjawaban atau pengawasan (controlling) serta pelaporan (reporting) yang berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Kata Kunci: Lembaga Pendidikan, Manajemen Keuangan, Organisasi Nirlaba

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, kebutuhan akan pendidikan yang bermutu menjadi sangat penting. Namun, pendidikan tidak dapat berlangsung secara optimal tanpa dukungan pembiayaan yang memadai. Oleh karena itu, biaya pendidikan menjadi komponen vital dalam penyelenggaraan pendidikan (Wijaya, 2009).

Salah satu lembaga yang turut mendukung penyelenggaraan pendidikan adalah lembaga bimbingan belajar (bimbel). Bimbel berperan penting dalam membantu siswa meningkatkan pemahaman dan prestasi belajar di luar jam sekolah formal. Namun demikian, keberlangsungan dan kualitas pelayanan di bimbel sangat dipengaruhi oleh bagaimana pengelolaan keuangan dilakukan. Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan bimbel yang baik menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan.

Pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan, termasuk bimbel, perlu mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan pendidikan harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip-prinsip ini sangat relevan untuk menjamin penggunaan dana secara optimal, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

Transparansi dalam pengelolaan dana mencakup keterbukaan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan, termasuk orang tua siswa, tenaga pengajar, dan pengelola yayasan. Hal ini selaras dengan pendapat Krina (2003) yang menyatakan bahwa prinsip transparansi menjamin akses masyarakat terhadap informasi publik mengenai kebijakan dan pelaksanaan pendidikan. Manajemen keuangan yang transparan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga.

Selain itu, prinsip akuntabilitas juga memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan pendidikan. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban lembaga untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara ekonomis, efisien, dan sesuai peraturan. Mardiasmo (2009) menyebutkan bahwa akuntabilitas dalam konteks pendidikan meliputi pertanggungjawaban terhadap proses, program, hingga kebijakan yang diterapkan oleh lembaga pendidikan.

Efektivitas dalam manajemen keuangan berarti bahwa dana yang dikelola benar-benar mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Mulyasa (2005) menyatakan bahwa efektivitas menunjukkan sejauh mana lembaga berhasil mencapai tujuannya dengan cara yang tepat dan sesuai. Efektivitas dalam

pembiayaan pendidikan juga erat kaitannya dengan keberhasilan program-program pembelajaran yang ditawarkan.

Di sisi lain, efisiensi menyangkut kemampuan lembaga dalam menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal. Menurut Fattah (2012), efisiensi dalam pendidikan diukur dari seberapa besar input yang digunakan dan seberapa besar hasil yang dicapai. Dalam praktiknya, efisiensi keuangan di bimbel dapat dilihat dari bagaimana lembaga mengalokasikan dana untuk kegiatan operasional, pengadaan bahan ajar, honor tenaga pengajar, dan lainnya.

Salah satu bentuk konkret dari penerapan prinsip efisiensi adalah dengan melakukan perencanaan anggaran yang cermat dan menghindari pemborosan dalam penggunaan dana. Hal ini sejalan dengan pemikiran Halim (2012) yang menyatakan bahwa efisiensi dicapai bila hasil yang diharapkan dapat dicapai dengan biaya yang rendah. Efisiensi internal dan eksternal juga harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan (Fattah, 2012).

Prinsip keadilan dalam pembiayaan pendidikan juga tak kalah penting. Setiap siswa harus memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses layanan pendidikan, termasuk bimbingan belajar, tanpa diskriminasi atas dasar kemampuan ekonomi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu secara adil dan merata.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua lembaga bimbingan belajar mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara optimal. Banyak di antaranya yang masih menghadapi tantangan dalam menyusun anggaran, melakukan pencatatan keuangan, serta menyampaikan laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian untuk melihat bagaimana pengelolaan keuangan diterapkan di lembaga bimbingan belajar tertentu.

Lembaga bimbingan belajar AHE RAJA EDUKASI menjadi salah satu objek yang menarik untuk dikaji. Lembaga ini telah beroperasi selama beberapa tahun dan memiliki jumlah peserta yang cukup banyak. Namun, sejauh mana prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dijalankan secara efektif dan efisien di lembaga ini masih belum diketahui secara pasti.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui aktivitas pembiayaan di AHE RAJA EDUKASI, bagaimana perencanaan dan implementasi pengelolaan keuangannya, serta apakah prinsip-prinsip keuangan sebagaimana yang diatur oleh regulasi pemerintah telah dilaksanakan dengan baik. Selain itu, kajian ini juga diharapkan mampu memberikan masukan dan rekomendasi bagi peningkatan

kualitas pengelolaan keuangan di lembaga-lembaga bimbingan belajar pada umumnya.

Terkait hal tersebut, beberapa penelitian terdahulu telah membahas pengelolaan keuangan pendidikan. Misalnya, penelitian oleh Yuliani (2018) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah yang baik berkorelasi positif dengan mutu pendidikan. Kemudian, penelitian dari Ramadhani (2020) menemukan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Penelitian lainnya oleh Fitria (2021) menegaskan bahwa efisiensi penggunaan dana sangat berperan dalam pencapaian target pembelajaran di bimbel swasta.

Dengan mempertimbangkan semua uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui aktivitas pembiayaan di Lembaga Bimbingan Belajar AHE RAJA EDUKASI. 2) Mengetahui bagaimana pengelolaan pembiayaan pendidikan di lembaga tersebut. 3) Mengetahui sejauh mana penerapan pengelolaan keuangan di Lembaga Bimbingan Belajar AHE RAJA EDUKASI sesuai dengan teori pengelolaan keuangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan kajian literatur jurnal karena penelitiannya menghasilkan data deskriptif yang membahas mengenai pengelolaan manajemen kas pada lembaga pendidikan (Sugiyono, 2018). Penelitian deskriptif yang peneliti lakukan, tidak menggunakan uji hipotesis akan tetapi hanya menggunakan data observasi dan kajian literatur.

Penelitian ini dilaksanakan pada Lembaga Bimbingan Belajar AHE RAJA EDUKASI, dengan pengambilan data primer berupa observasi dan wawancara sederhana. Selain itu peneliti juga melaksanakan pengambilan data sekunder dengan dokumentasi. Analisis data dilaksanakan dengan mengacu pada teori Miles dan Huberman.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aktivitas Pembiayaan di Lembaga Bimbingan Belajar AHE RAJA EDUKASI

Sumber pendanaan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam keberlangsungan operasional sebuah lembaga pendidikan, termasuk bimbingan belajar (bimbel). Lembaga Bimbingan Belajar AHE RAJA EDUKASI memiliki beberapa sumber dana utama yang digunakan untuk menunjang seluruh aktivitas pembelajaran dan administrasi. Sumber-sumber dana ini dikelola secara terencana

dan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas program pembelajaran yang telah disusun lembaga.

Salah satu sumber dana utama yang dimiliki oleh Bimbingan Belajar AHE RAJA EDUKASI adalah dana dari yayasan. Dana ini dikucurkan secara langsung oleh yayasan kepada bagian keuangan bimbel dan dialokasikan untuk membayar gaji para tutor. Pendanaan dari yayasan ini bersifat tetap dan rutin, sehingga menjadi sumber pendapatan yang stabil untuk membiayai operasional utama bimbel. Menurut penelitian oleh Anindita dan Mulyadi (2021), dukungan dana dari yayasan atau lembaga induk sangat berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan lembaga pendidikan swasta, terutama untuk pembiayaan tenaga pendidik (Anindita & Mulyadi, 2021).

Selain dari yayasan, sumber dana lainnya berasal dari pembayaran Sumbangan Pelayanan Pendidikan (SPP) oleh orang tua siswa. Dana ini bersifat partisipatif dan dibayarkan secara bulanan. Namun, dalam praktiknya, pembayaran SPP ini tidak selalu berjalan lancar dan tepat waktu. Perbedaan tanggal jatuh tempo pembayaran oleh masing-masing orang tua siswa kerap menyebabkan keterlambatan dalam pengumpulan dana, sehingga berpengaruh terhadap waktu pembayaran gaji tutor. Hal ini sejalan dengan temuan Pratiwi dan Nugroho (2022) yang menyebutkan bahwa sistem pembayaran iuran bulanan yang tidak seragam dapat memengaruhi arus kas lembaga pendidikan swasta secara signifikan (Pratiwi & Nugroho, 2022).

Sumber dana ketiga berasal dari biaya pendaftaran siswa baru. Dana ini diterima saat siswa mendaftar pertama kali untuk mengikuti program bimbingan belajar di AHE RAJA EDUKASI. Dana ini umumnya digunakan untuk pembelian alat tulis, modul pembelajaran, dan biaya administrasi awal. Penerimaan dana dari pendaftaran ini bersifat musiman karena hanya terjadi saat pembukaan tahun ajaran baru atau saat penerimaan gelombang baru. Hal ini sejalan dengan pernyataan oleh Rahayu (2021) yang menyebutkan bahwa dana pendaftaran peserta didik baru menjadi sumber pendanaan penting meski sifatnya tidak tetap (Rahayu, 2021).

Dana dari yayasan yang digunakan sebagai kas berjalan sering kali menjadi andalan utama untuk pembiayaan tetap, terutama dalam pembayaran honor tutor. Dengan kondisi pembayaran SPP yang fluktuatif, dana yayasan berfungsi sebagai penyangga keuangan agar operasional tetap berjalan. Menurut Iskandar dan Putri (2023), pembiayaan tetap seperti gaji harus memiliki sumber dana yang stabil agar tidak mengganggu ritme proses belajar mengajar di lembaga pendidikan non-formal (Iskandar & Putri, 2023).

Sementara itu, dana dari SPP memiliki potensi besar sebagai pemasukan rutin. Namun, diperlukan sistem manajemen keuangan yang baik agar dana tersebut dapat dikumpulkan dan dikelola secara efektif. Sistem pengingat pembayaran, insentif

untuk pembayaran tepat waktu, dan fleksibilitas skema pembayaran menjadi strategi yang disarankan oleh beberapa peneliti. Fitriani dan Sari (2020) menyatakan bahwa pengelolaan dana partisipatif orang tua dapat dioptimalkan melalui pendekatan digital dan komunikasi dua arah yang aktif (Fitriani & Sari, 2020).

Pendanaan dari pendaftaran siswa baru, walaupun tidak terjadi setiap bulan, memiliki nilai strategis dalam menutupi biaya awal operasional, seperti pengadaan modul baru atau perbaikan fasilitas. Karena sifatnya yang musiman, pengelolaan dana ini harus dilakukan dengan perencanaan jangka panjang agar penggunaannya tidak tumpang tindih dengan kebutuhan bulanan. Menurut studi oleh Lestari dan Hamid (2022), pengalokasian dana musiman sebaiknya ditujukan untuk kebutuhan jangka panjang atau investasi pengembangan lembaga (Lestari & Hamid, 2022).

Dalam pengelolaannya, Bimbingan Belajar AHE RAJA EDUKASI perlu mengintegrasikan ketiga sumber dana tersebut ke dalam satu sistem keuangan yang terstruktur agar dapat diketahui arus masuk dan keluar dana secara transparan dan akuntabel. Penggunaan aplikasi keuangan atau pelaporan berkala dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana. Hal ini ditekankan oleh Munandar dan Dewi (2023) yang menjelaskan bahwa sistem pencatatan keuangan digital mempermudah proses audit internal dan eksternal dalam lembaga pendidikan (Munandar & Dewi, 2023).

Dengan keberadaan tiga sumber utama pendanaan tersebut—yakni dana yayasan (kas berjalan), SPP dari orang tua siswa, dan dana dari pendaftaran siswa baru—Bimbingan Belajar AHE RAJA EDUKASI diharapkan mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Pengelolaan yang profesional dan sesuai prinsip-prinsip keuangan seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi akan mendukung keberlangsungan program pendidikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

Pengelolaan Keuangan Sekolah pada Lembaga Bimbingan Belajar AHE RAJA EDUKASI

Pengelolaan keuangan dalam sebuah lembaga pendidikan seperti Bimbingan Belajar (Bimbel) AHE RAJA EDUKASI merupakan proses penting yang harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Tahapan pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pertanggungjawaban, hingga pelaporan. Pada tahap perencanaan, bimbel melakukan penganggaran di awal tahun ajaran untuk memperkirakan seluruh kebutuhan biaya operasional. Meskipun perencanaan telah dilakukan dengan matang, tantangan tetap ada, khususnya dalam rapat komite bersama wali murid yang seringkali kesulitan mencapai kesepakatan dalam menentukan besaran Sumbangan Pelayanan Pendidikan (SPP). Hal ini

menunjukkan perlunya pendekatan komunikasi yang lebih persuasif dan transparan agar semua pihak memahami pentingnya kontribusi biaya pendidikan (Aprilia et al., 2025).

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan di Bimbel AHE RAJA EDUKASI dilakukan dengan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran disertai bukti transaksi yang sah. Bukti transaksi ini menjadi dokumen penting untuk pertanggungjawaban keuangan kepada pihak terkait. Seluruh dana yang dikeluarkan diarahkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Namun, masalah muncul ketika proses penagihan terhadap pembayaran SPP yang tertunda tidak berjalan efektif. Hal ini mencerminkan pentingnya literasi keuangan bagi orang tua siswa dan sistem pengingat pembayaran yang lebih terintegrasi secara digital (Purnama, 2024).

Dalam proses pencatatan keuangan, Bimbel AHE RAJA EDUKASI telah melakukan pencatatan secara baik dan tidak memiliki catatan peminjaman kepada pihak ketiga seperti bank. Namun, permasalahan utama pada tahap ini adalah ketidakefisienan pembagian tugas bendahara. Kurangnya pembagian tugas yang jelas dapat menyebabkan tumpang tindih pekerjaan dan menurunkan akurasi pencatatan. Purnama dan Wibisono (2025) menekankan bahwa sistem manajerial yang efektif di era digital memerlukan struktur organisasi yang fleksibel dan jelas dalam tugas serta tanggung jawab setiap bagian untuk menjaga efisiensi kerja.

Pertanggungjawaban keuangan dilakukan dengan pengawasan langsung oleh pemilik bimbel setiap bulan. Ini merupakan bentuk kontrol jangka pendek yang penting untuk memastikan keuangan lembaga dikelola dengan akuntabel. Audit internal secara berkala merupakan praktik yang direkomendasikan agar lembaga memiliki data keuangan yang valid dan siap jika dibutuhkan oleh pihak luar. Kontrol ini mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan, sebagaimana juga ditekankan dalam prinsip good governance pendidikan (Syaipudin & Luthfi, 2024).

Pelaporan keuangan di Bimbel AHE RAJA EDUKASI dilakukan secara langsung kepada pemilik yayasan, terutama yang berkaitan dengan dana SPP. Pelaporan ini belum dilakukan secara terbuka kepada pihak lain seperti komite atau wali murid, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi publik. Dalam era digital saat ini, pelaporan keuangan sebaiknya dapat diakses oleh pihak berkepentingan agar terjadi partisipasi dan pengawasan kolektif. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan (Syaipudin & Aziz, 2024).

Keberadaan sistem pelaporan digital yang terintegrasi akan sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi laporan keuangan. Sistem ini memungkinkan laporan dapat disusun lebih cepat, akurat, dan mudah diaudit.

Aprilia et al. (2025) menyebutkan bahwa penguasaan literasi keuangan dan penggunaan pembayaran digital memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan menyusun laporan keuangan secara efektif, terutama dalam konteks lembaga skala kecil hingga menengah seperti bimbel.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Bimbel AHE RAJA EDUKASI dapat mengadopsi sistem manajemen keuangan berbasis teknologi informasi. Hal ini tidak hanya memudahkan dalam pencatatan dan pelaporan, tetapi juga memperkuat kontrol dan akuntabilitas terhadap penggunaan dana. Purnama (2024) menegaskan bahwa penggunaan strategi pelatihan dan digitalisasi dapat mengoptimalkan kinerja organisasi, termasuk lembaga pendidikan non-formal, melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi proses kerja.

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan di Bimbel AHE RAJA EDUKASI telah mencakup seluruh aspek penting dalam manajemen keuangan pendidikan. Namun, masih diperlukan peningkatan pada sisi transparansi pelaporan, efisiensi pembagian tugas, dan sistem penagihan yang lebih modern agar pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Inovasi manajerial dan pendekatan berbasis teknologi informasi menjadi hal yang sangat relevan untuk diterapkan dalam menghadapi tantangan keuangan lembaga pendidikan masa kini.

Penerapan Pengelolaan Keuangan di Lembaga Bimbingan Belajar AHE RAJA EDUKASI sesuai dengan teori pengelolaan keuangan

Pengelolaan keuangan di Bimbingan Belajar (Bimbel) AHE RAJA EDUKASI telah mengacu pada prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan pendidikan yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Dalam praktiknya, tanggung jawab atas penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan diserahkan kepada masing-masing unit atau cabang, sementara pengawasan secara menyeluruh tetap menjadi wewenang pemilik bimbel. Pendekatan ini memungkinkan adanya distribusi tanggung jawab yang luas, namun tetap menjaga sentralisasi kontrol agar dana digunakan secara tepat dan sesuai tujuan peningkatan mutu pendidikan.

Bimbel AHE RAJA EDUKASI menjalankan proses perencanaan anggaran di awal tahun ajaran, meskipun sering kali perencanaan ini hanya mengacu pada anggaran tahun sebelumnya tanpa revisi yang signifikan. Keterbatasan dalam merumuskan anggaran baru berdampak pada ketidaksesuaian antara realisasi dan kebutuhan aktual di lapangan. Menurut Tooley dan Guthrie (2007), anggaran bukan hanya alat pengeluaran, namun berfungsi sebagai instrumen pengendalian yang membantu kepala unit menjaga efisiensi dan akurasi penggunaan dana. Kurangnya perencanaan yang baik dapat menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan keuangan.

Literatur anggaran lainnya menyebutkan bahwa anggaran memiliki fungsi penting dalam peningkatan kinerja manajerial serta pengendalian biaya (Covaleski, 2013; Horngren et al., 2013; Drury, 2012 dalam Mah'd, 2014). Mah'd juga mengungkapkan bahwa walaupun anggaran penting, kinerja manajerial seringkali tidak dinilai berdasarkan perbandingan antara hasil aktual dan anggaran yang dirancang sebelumnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bimbel AHE RAJA EDUKASI untuk menjadikan anggaran sebagai tolok ukur dalam menilai pencapaian tujuan lembaga.

Dalam realitas pengelolaan keuangan pendidikan, pengeluaran terbesar umumnya digunakan untuk membayar gaji tutor. Yunas (2014) mencatat bahwa lebih dari 50% dari total anggaran pendidikan dihabiskan untuk gaji, dan di beberapa negara berkembang, seperti Pakistan, bahkan mencapai lebih dari 96%. Di AHE RAJA EDUKASI, alokasi dana untuk gaji tutor juga mendominasi pengeluaran, yang menuntut efisiensi tinggi dalam pengelolaan dana lainnya untuk tetap mendukung kegiatan pembelajaran dan peningkatan mutu layanan pendidikan.

Prinsip transparansi dijalankan dengan menunjukkan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan kepada orang tua siswa, terutama dalam penentuan dan pembagian SPP setiap bulannya. Keterbukaan ini mencakup informasi tentang sumber dana, jumlah dana yang tersedia, serta rincian penggunaannya. Transparansi dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para wali murid yang menjadi pihak pemberi dana melalui pembayaran rutin bulanan. Dengan adanya keterbukaan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga semakin meningkat.

Akuntabilitas diterapkan dalam setiap tahapan penggunaan dana, di mana setiap pengeluaran disesuaikan dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dana hanya dibelanjakan sesuai dengan program yang telah dirancang, dan setiap transaksi dilengkapi dengan bukti pembayaran atau bukti penerimaan yang sah. Sistem ini memastikan bahwa tidak ada pengeluaran yang tidak terencana, dan seluruh dana dikelola secara bertanggung jawab oleh setiap unit.

Efektivitas dalam pengelolaan keuangan tercermin dari bagaimana dana digunakan untuk membiayai aktivitas lembaga yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Dana yang terbatas tetap diarahkan untuk kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap kualitas pembelajaran. Kegiatan peningkatan mutu seperti pelatihan tutor, pengadaan modul, dan evaluasi hasil belajar dibiayai dari anggaran yang telah ditentukan. Efektivitas menjadi ukuran keberhasilan lembaga dalam menggunakan dana secara tepat sasaran.

Prinsip efisiensi juga menjadi pilar utama dalam manajemen keuangan Bimbel AHE RAJA EDUKASI. Efisiensi dicapai ketika dana yang terbatas dapat digunakan secara optimal untuk menghasilkan output pendidikan yang maksimal. Hal ini

mencakup pengelolaan biaya operasional, pengurangan pemborosan, dan optimalisasi sumber daya keuangan untuk mendukung program-program unggulan bimbel. Dengan menerapkan prinsip efisiensi, Bimbel tidak hanya mampu mempertahankan keberlangsungan operasional, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing dan mutu pelayanan pendidikannya di tengah persaingan lembaga bimbel lainnya.

KESIMPULAN

Lembaga Bimbingan Belajar AHE RAJA EDUKASI mengandalkan tiga sumber dana utama, yaitu dana dari yayasan, pembayaran SPP oleh orang tua siswa, serta dana pendaftaran siswa baru. Pengelolaan keuangan lembaga ini telah melalui tahapan penting yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pengawasan, dan pelaporan, serta dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Namun, dalam pelaksanaannya masih dijumpai sejumlah kendala, seperti ketidakteraturan waktu pembayaran SPP, tantangan dalam proses penagihan, pembagian tugas bendahara yang belum maksimal, serta pola perencanaan anggaran yang masih cenderung mengacu pada tahun sebelumnya tanpa pembaruan berdasarkan kebutuhan nyata. Secara umum, sistem keuangan Bimbel AHE RAJA EDUKASI sudah mengarah ke praktik manajemen keuangan yang baik, tetapi masih membutuhkan penguatan dalam implementasinya.

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, perlu dilakukan pembenahan dalam proses perencanaan anggaran dengan menyusunnya berdasarkan kebutuhan aktual yang relevan, bukan sekadar menyalin dari tahun sebelumnya. Sistem penagihan SPP juga sebaiknya ditingkatkan dengan menggunakan metode pengingat otomatis yang terjadwal agar pembayaran lebih teratur dan tepat waktu. Di samping itu, pembagian tugas dalam pengelolaan keuangan harus ditata lebih rinci agar proses pencatatan dan administrasi berjalan dengan lebih efisien. Lembaga juga disarankan untuk meningkatkan transparansi terhadap orang tua siswa dengan menyampaikan informasi terbuka mengenai penggunaan dana secara berkala. Terakhir, evaluasi dan audit keuangan internal secara rutin sangat diperlukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik serta mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di lembaga.

REFERENSI

- Anindita, R., & Mulyadi, A. (2021). Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan Nonformal Berbasis Yayasan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 145–156.
- Aprilia, N. S., Nabila, E., Masrifah, U., & Purnama, C. (2025). Analisis Penguasaan Literasi Keuangan, Digital Payment dan Kemampuan Penyusunan Laporan

- Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Mojokerto (Literature Review). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Modern dan Tradisional*, 2(1), 68–75.
- Fattah, N. (2012). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fitria, N. (2021). “Efektivitas dan Efisiensi Dana pada Bimbel Swasta”, *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(3), 78-85.
- Fitriani, D., & Sari, R. (2020). Optimalisasi Dana SPP Melalui Digitalisasi Pembayaran. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 8(1), 30–40.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Iskandar, A., & Putri, Y. (2023). Pembiayaan Operasional Tetap di Bimbel Swasta. *Jurnal Keuangan Pendidikan*, 6(2), 89–98.
- Krina, E. (2003). *Indikator Good Governance*. Jakarta: Bappenas.
- Lestari, M., & Hamid, S. (2022). Manajemen Keuangan Musiman di Lembaga Pendidikan Nonformal. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 7(4), 233–242.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyasa, E. (2005). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munandar, H., & Dewi, P. (2023). Digitalisasi Sistem Keuangan di Lembaga Bimbingan Belajar. *Jurnal Sistem Informasi Pendidikan*, 5(2), 77–86.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Pratiwi, L., & Nugroho, A. (2022). Tantangan Arus Kas dalam Lembaga Pendidikan Swasta. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 4(3), 210–219.
- Purnama, C. (2024). Optimizing Training Strategies: Enhancing Effectiveness and Performance Outcomes. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 12(3), 901–913.
- Purnama, C., & Wibisono, K. (2025). Ekonomi Manajerial Bisnis Digital Monetisasi Trafight Pembaca di Jurnal Ngawi part of Pikiran Rakyat Media Network. *MANAGING AND ACCOUNT: Jurnal Ekonomi Manajerial Bidang Akuntansi dan Manajemen*, 1(1), 22–28.
- Rahayu, N. (2021). Strategi Pengelolaan Dana Pendaftaran Peserta Didik Baru. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 9(1), 56–64.
- Ramadhani, R. (2020). “Analisis Transparansi Keuangan di Lembaga Pendidikan Swasta”, *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 8(2), 122-131.
- Syaipudin, L., & Aziz, A. (2024). Problematic Analysis of Changes in Islamic Education in the Digital Era at Madrasah Ibtidaiyah Level in East Java Province Indonesia. *Traditional Journal of Law and Social Sciences*, 3(01), 14–28.
- Syaipudin, L., & Luthfi, A. (2024). Peran Guru dalam Aplikatif Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Berkebutuhan Khusus pada Sekolah Luar Biasa. *Jurnal Ilmiah Insan Mulia*, 1(1), 27–33.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Wijaya, A. (2009). *Ekonomi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.

Yuliani, D. (2018). “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Sekolah terhadap Mutu Pendidikan”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 10(1), 45-52.